

STRATEGI POLITIK DEVIDE ET IMPERA BELANDA DAN RELEVANSINYA DENGAN POLARISASI AGAMA PASCA PILPRES 2019 DI INDONESIA

Jafar Ahmad¹,
Institut Agama Islam Negeri Kerinci¹,
jafar@iainkerinci.ac.id¹,

Gesit Yudha²
Universitas Islam Negeri Raden Intan
gesityudha@radenintan.ac.id²

Diterima: 6 November 2022

Disetujui: 21 Desember 2022

Dipublikasikan: 22 Desember 2022

Abstract

The divide et impera political strategy worked effectively and was used by the Dutch to colonize Indonesia. This divide and conquer strategy has destroyed the solidity and strength of the Indonesian nation, so that it was scattered in a civil war. However, entering the 20th century, the divisive politics played by the Dutch began to be less relevant to work, so the Dutch had to give up and leave Indonesia in 1942. How the Dutch's divisive politics worked became the focus of this research. Then, how is the connection and relevance with the religious polarization that is currently sweeping the Indonesian nation to be a topic that is also discussed. This study uses a qualitative approach by examining various literature such as journals, books, documents and news information in the mass media. the political phenomenon after the 2019 presidential election that occurred in Indonesia with divisive politics in the Dutch style and there are those who benefit if there are two parties fighting with the intention of controlling the resources in Indonesia. This research finds facts, the success of the divisive politics carried out by the Dutch to colonize Indonesia for hundreds of years, including the economic dependence of the elite group in Indonesia on the Dutch; political and economic stability in the Netherlands. While the factors of failure, among others, the economic crisis experienced by the Netherlands; There was no longer the dependency of the Indonesian elite on the Dutch. The relevance to the current religious polarization is that the divide et impera politics can still work and can destroy the unity of the Indonesian nation if the conditions for its success are met.

Keywords: *Devide et Impera, Netherlands, colonialism, civil war*

Abstrak

Strategi politik devide et impera pernah bekerja secara efektif dan digunakan Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia. Strategi pecah dan kuasai tersebut telah menghancurkan soliditas dan kekuatan bangsa Indonesia, sehingga tercerai-berai dalam perang saudara. Namun, memasuki abad ke 20, politik pecah belah yang dimainkan Belanda mulai kurang relevan bekerja, sehingga Belanda harus menyerah kalah dan hengkang dari Indonesia pada tahun 1942. Bagaimana politik pecah belah Belanda ini bekerja menjadi konsentrasi penelitian ini. Lalu, bagaimana pula keterhubungan dan relevansinya dengan polarisasi agama yang kini melanda bangsa Indonesia menjadi topik yang juga dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah bermacam literatur seperti jurnal, buku, dokumen maupun informasi berita di media massa. fenomena politik pasca pilpres 2019 yang terjadi di Indonesia dengan politik pecah belah ala Belanda dan ada yang

diuntungkan apabila ada dua belah pihak yang bertikai dengan maksud menguasai sumber daya yang ada di Indonesia. Penelitian ini menemukan fakta, keberhasilan politik pecah belah yang dijalankan Belanda untuk menjajah Indonesia selama ratusan tahun tersebut, antara lain adanya ketergantungan ekonomi kelompok elite di Indonesia terhadap Belanda; adanya stabilitas politik dan ekonomi di negeri Belanda. Sedangkan faktor kegagalannya, antara lain terjadinya krisis ekonomi yang dialami Belanda; Tidak ada lagi ketergantungan kelompok elite Indonesia terhadap Belanda. Relevansinya dengan polarisasi agama yang terjadi di masa sekarang adalah bahwa politik *divide et impera* masih bisa bekerja dan dapat menghancurkan persatuan bangsa Indonesia jika syarat-syarat keberhasilannya terpenuhi.

Kata Kunci: *Divide et Impera, Belanda, penjajahan, perang saudara*

A. PENDAHULUAN

Asal muasal politik *divide et impera* ini bermula dari penaklukan bangsa Spanyol terhadap suku Indian yang bermukim di Amerika Latin, abad ke-15. Penaklukan tersebut telah mendatangkan kekayaan bagi bangsa Spanyol, mereka memperbudak penduduk asli, menguasai emas, perak dan lahan-lahan produktif sehingga peradaban bangsa Spanyol semakin maju. Keberhasilan Spanyol tersebut kemudian menginspirasi negara-negara Eropa lainnya. Negara-negara tersebut kemudian tergerak untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan invasi ke negara lain seperti yang dilakukan Spanyol, dengan menjalankan politik pecah belah.¹

Divide et impera adalah taktik militer yang dijalankan aktor superior (unggul) kepada aktor inferior (lemah). Tujuannya guna meraih keuntungan material bagi aktor superior. Sejak dulu, para penjajah memanfaatkan taktik ini untuk menguasai wilayah kolonialnya.² Kelompok penjajah ini menjalankan taktik pecah belah dengan cara membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok kecil yang didasarkan pada kesamaan bahasa, etnis ataupun agama.³ Sederhananya, Belanda menggunakan populasi yang telah terpecah-pecah ke dalam segmen tertentu tersebut untuk menciptakan dominasi dan meraih keuntungan.

Cara kerja strategi *divide et impera* ini, antara lain membuat perbedaan terhadap kelompok masyarakat yang diinvasi; menciptakan perbedaan baru; mengeksploitasi perbedaan sehingga terjadi jurang pemisah yang semakin dalam; mengkapitalisasi perbedaan sampai pasca penjajahan berhasil. Dalam konteks penelitian ini, Belanda

¹ S. Rochayati, *Jatuhnya Benteng Ujung Pandang, Makassar pada Belanda (VOC)*. Surakarta: UNS-FKIP Prog. Studi Pendidikan Sejarah, 2010.

² S. Hermawan, *Tionghoa dalam Novel Ca-Bau-Kan*. Yogyakarta: Basabasi, 2018.

³ A. Habib, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan*. Yogyakarta: LKiS, 2014.

sebagai kelompok superior membangun dominasi dan menjajah bangsa Indonesia yang dianggap inferior melalui instrumen politik pecah belah.⁴

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), suatu perusahaan swasta asal Belanda adalah kelompok pertama yang mengenalkan politik *divide et impera* di Indonesia, pada abad ke-16. Strategi politik yang dikenal dengan istilah politik pecah belah tersebut digunakan VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, menguasai penduduk dan melestarikan kolonialisme di Indonesia.⁵ Tujuan terpenting dari politik pecah belah tersebut adalah menaklukkan raja-raja di nusantara dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. VOC menggunakan politik pecah belah dengan mengadu domba untuk menghancurkan soliditas penduduk Indonesia. Ketika soliditas kelompok tercerai-berai, maka, kelompok tersebut lebih mudah dikuasai dan dikendalikan. Sejarah mencatat VOC menebarkan permusuhan dan menciptakan perang saudara sehingga sukses menaklukkan kerajaan besar di nusantara.⁶

Strategi pecah dan kuasai diterapkan VOC untuk menghancurkan kekuatan bangsa Indonesia sehingga menjadi kekuatan kecil. Setelah menjadi kekuatan kecil, politik pecah belah terus dimainkan untuk mencegah kekuatan kecil tersebut dapat bersatu kembali.⁷ Dengan kondisi seperti itu, bangsa Indonesia akan lebih mudah dikontrol dan dikuasai. Relevansi strategi politik pecah belah dengan polarisasi agama yang terbentuk karena Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2019 lalu adalah karena kelompok yang terlibat konflik dan menciptakan polarisasi agama adalah kelompok Islam fundamentalisme yang jumlahnya cukup besar di Indonesia.⁸ Strategi politik pecah belah jika terus menerus dibiarkan bisa berdampak pada instabilitas di Indonesia. Polarisasi agama yang kian dalam dan membesar dapat merusak persatuan dan menceraikan beraikan bangsa Indonesia.⁹

Cara politik *divide et impera* ini bekerja berdasarkan pengalaman VOC dan Belanda adalah dengan menyokong satu kelompok yang tengah terlibat konflik. Kemudian membentuk polarisasi yang menyebabkan masing-masing kelompok berseteru dan saling bertentangan. Untuk jangka pendek strategi ini terbilang efektif digunakan untuk mencapai

⁴ N. Olii, *Politik Kolonial Belanda Dalam Menanamkan Kekuasaan di Minahasa Abad ke-17*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2015.

⁵ A. Supriyono, "Tinjauan historis Benteng VOC di Jepara," *Historical Studies Jurnal*, 2015, h. 26-39.

⁶ A. K. Wiharyanto, *Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2008, h. 33-40.

⁷ S. Rokhman, "Panduan Islam Dalam Berkomunikasi Lintas Suku dan Budaya," *Jurnal Dakwah*, 2021, h. 123-133.

⁸ Syeirazi, *Wasathiyah Islam*. Jakarta: Alif.id, 2020, h. 1-3.

⁹ P. Syarwi, "Polarisasi Isu, Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019," *Jurnal Communitarian*, 2022, h. 591-602.

tujuan kepentingan tertentu, namun, dalam jangka panjang strategi pecah belah ini bisa menciptakan disabilitas bangsa.¹⁰ Dari catatan sejarah menunjukkan Belanda memanfaatkan politik pecah belah, yaitu dengan cara mengadu domba komponen bangsa, mendukung satu kelompok untuk memerangi kelompok lain, menciptakan raja boneka dan melemahkan kekuatan bangsa sebelum melancarkan perang fisik. Strategi pecah belah dalam konteks militer dipandang efisien, berbiaya rendah dalam suatu peperangan.¹¹

Strategi ini bisa dijalankan dengan tindakan represif, misalkan mengkarantina wilayah ataupun menyerang kelompok tertentu. Di samping itu, politik pecah belah ini bisa digunakan secara ideologis, yaitu dengan mengeksploitasi dan memperbesar perbedaan di antara kelompok masyarakat ataupun melakukan tindakan represi terhadap pemikiran-pemikiran tertentu. Belanda juga menggunakan politik pecah belah untuk menciptakan teror psikologis, seperti membangun narasi ancaman dari kelompok ekstrim, baik kiri maupun kanan. Teror juga dilakukan terhadap etnis tertentu, misalkan etnis Tionghoa, sehingga terbentuk sentimen rasial dan ini sesungguhnya bagian dari strategi politik pecah belah yang dijalankan Belanda.¹² Karena itu, memahami bagaimana strategi politik *divide et impera* berfungsi dan dijalankan Belanda untuk menjajah Indonesia serta kaitannya dengan polarisasi agama yang terbentuk di Indonesia di masa sekarang akan menjadi topik utama penelitian ini.

Strategi politik *divide et impera* telah banyak diteliti. Misalkan penelitian dengan topik *Divide et Impera: Mengenal Taktik dan Strategi Orang Belanda* yang dilakukan oleh Dharma Kelana Putra pada tahun 2014 lalu. Dalam penelitiannya, Dharma mendeskripsikan *Divide et impera* sebagai kombinasi strategi Belanda dalam konteks politik, militer, maupun ekonomi. Taktik tersebut dijalankan untuk memperoleh serta mengontrol kekuasaan di Indonesia. Caranya adalah dengan membelah masyarakat menjadi kelompok kecil sehingga gampang ditaklukkan. Dalam risetnya ia mengulas tentang bagaimana taktik pecah belah digunakan untuk mencegah masing-masing kelompok Bersatu Kembali.¹³ Penelitian lainnya dilakukan Ginting yang memotret bagaimana Belanda melancarkan taktik pecah belah dengan membujuk dan menghasut

¹⁰ Y. M. Iranti Mantasari, "Strategi *Divide et Impera* oleh Amerika Serikat dalam Konflik di Suriah," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 2020, h. 18-38.

¹¹ Muhammad Agung Sujadi, "Kebijakan Uang Darurat Lampung pada Agresi Militer Belanda II di Lampung Tahun 1949," *Garuda*, 2018, 1-12.

¹² A. Santoso, *Dampak Kerusuhan Mei 1998 terhadap Perekonomian Masyarakat Etnis Tionghoa di Surakarta*. Surakarta: STKIP PGRI Pacitan, 2021.

¹³ D. K. Putra, "*Divide et Impera*" *Mengenal Taktik dan Strategi Orang Belanda*. Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014.

tokoh adat di Simalungun. Tokoh adat diimangi jabatan, kekuasaan dan uang yang berlimpah oleh Belanda jika bersedia berkolaborasi. Belanda mengangkat dan melegitimasi tokoh adat yang berpihak padanya tanpa persetujuan masyarakat luas. Tokoh adat tersebut kemudian dibenturkan dengan tokoh lain yang telah lebih dahulu menjabat raja.¹⁴ Lalu penelitian *Haldi Patra yang hanya menyinggung taktik divide et impera dijalankan Belanda dalam kasus perang padri, kemudian dalam konteks perang Diponegoro dan penguasaan di Aceh. Penelitiannya hanya focus mengkonstruksi dan menjelaskan peristiwa sejarah tersebut secara historis. Peneliti hanya memotret singkat bagaimana divide et impera digunakan Belanda untuk menciptakan perang saudara di Indonesia*

Akan tetapi, belum ada peneliti yang memfokuskan risetnya pada faktor keberhasilan dan kegagalan taktik divide et impera serta relevansinya dengan polarisasi agama yang terjadi di masa sekarang. Hal ini lah yang merupakan novelty atau kebaruan riset ini. Hasil penelitian ini menunjukkan, keberhasilan politik pecah belah yang dijalankan Belanda untuk menjajah Indonesia selama ratusan tahun tersebut, antarlain adanya ketergantungan ekonomi kelompok elite di Indonesia terhadap Belanda; adanya stabilitas politik dan ekonomi di negeri Belanda. Sedangkan faktor kegagalannya, antarlain terjadinya krisis ekonomi yang dialami Belanda; Tidak ada lagi ketergantungan kelompok elite Indonesia terhadap Belanda. Relevansinya dengan polarisasi agama yang terjadi di masa sekarang adalah bahwa politik divide et impera masih bisa bekerja dan dapat menghancurkan persatuan bangsa Indonesia jika syarat-syarat keberhasilannya terpenuhi.

B. METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Riset ini menganalisis politik divide et impera di zaman penjajahan Belanda dan konflik yang melibatkan kelompok fundamentalisme agama di masa sekarang. Relasi dan keterhubungan antara polarisasi agama dan penerapan strategi divide et impera yang dijalankan Belanda di masa silam dalam mencapai kepentingannya akan dapat terjelaskan. Riset ini menggunakan data yang relevan yang diambil dari jurnal, tesis, disertasi, ataupun informasi di media massa yang bisa digunakan untuk menganalisis riset ini. Peneliti menggunakan teknik analisis data Robert K. Yin (2011) dan Michael Huberman (1994)

¹⁴ A. M. Ginting, "Pengaruh Belanda Terhadap Struktur Pemerintahan dan Kehidupan Politik Kerajaan Purba 1906 – 1945," *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2017, 1-14.

dalam menganalisis data yang telah ada.¹⁵

Data ataupun informasi tersebut kemudian disusun, misalkan memetakan siapa aktor yang terseret dalam konflik, lalu menggali apa kepentingannya, serta apa tindakan yang dijalankan, sampai polarisasi yang terbentuk dan itu menjadi database peneliti untuk menginterpretasikan temuan dalam narasi baru yang menjadi kunci analisis. Begitu memperoleh interpretasi, peneliti kemudian menarik sebuah kesimpulan.¹⁶ Teori dominasi dikombinasikan dengan strategi *divide et impera* untuk menjelaskan temuan riset ini, yaitu bagaimana Belanda membelah dan mengendalikan aktor-aktor yang berkonflik. Relevansi strategi pecah belah ini akan tergambar pada tahap akhir, yakni verifikasi, sehingga pertanyaan riset bisa dijawab.

Peneliti menggunakan teknik simak dan catat dalam melakukan pengolahan data. Teknik tersebut adalah lanjutan dari teknik membaca, yang digunakan sebagai pendalaman pemahaman dari data yang dibaca. Analisis data tersebut kemudian dideskripsikan dengan menggunakan bahasa ilmiah secara verbalistik, yaitu dalam bentuk kalimat-kalimat. Singkatnya, data hasil analisis disajikan bukan dalam bentuk angka, tapi kalimat yang panjang.¹⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Kerja Politik *Divide et Impera* Belanda di Indonesia

Belanda, dalam mencapai misinya menjajah Indonesia adalah dengan berupaya menjadi suatu kelompok yang dominan. Sementara, dominasi hanya dapat tercipta ketika ada suatu kelompok yang lebih unggul keberadaannya dari kelompok lain.¹⁸ Terciptanya kelompok superior karena ada kelompok lain yang lebih inferior.¹⁹ Ketika datang ke Indonesia, Belanda justru menghadapi penduduk yang kuat, juga dengan segala surplus yang ada. Sehingga, upaya penjajahan, penaklukan dan dominasi tidak mungkin tercapai jika penduduk Indonesia superior. Belanda kemudian menggunakan instrumen politik

¹⁵ R. T. Nurwiyati, "Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Dalam Memperjuangkan Kepentingan Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2017, 1-10.

¹⁶ Khairunnisa. *Motivasi dan Perilaku Hijrah pada Remaja Ditinjau dari Teori Tindakan Sosial Max Weber*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

¹⁷ Ardini Mulyadi, "Narasi Sejarah Novel Tomboka Karya Agus Sumbogo: Kajian Sosiologi Sastra," *Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud*, 2018, 75-80.

¹⁸ F. A. Ahmad. *Hibriditas Tokoh Belanda Dalam Kumpulan Semua Untuk Hindia Karya Iksaka Banu: Suatu Kajian Poskolonial*. Padang: Universitas Andalas, 2016.

¹⁹ Y. S. Lestari, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama," *Journal of Politics and Policy*, 2018, 19-30.

divide et impera, yaitu strategi politik pecah belah dan kuasai untuk melemahkan dan menghancurkan kekuatan penduduk Indonesia. Ketika penduduk Indonesia lemah, secara otomatis mereka akan menjadi kelompok inferior. Dengan demikian, dominasi dapat dengan mudah dijalankan. Hal ini lah yang dilakukan Belanda sebelum, ketika dan untuk melanggengkan kekuasaannya selama di Indonesia. Soliditas penduduk Indonesia dihancurkan melalui strategi pecah belah. Fragmentasi masyarakat sengaja diciptakan, mereka lalu dibentur-benturkan dan dikendalikan.²⁰

Strategi pecah belah yang dijalankan Belanda di Indonesia, antara lain dengan mengkapitalisasi polarisasi agama. Cara kerjanya adalah dengan menjadi teman bagi satu kelompok, lalu menciptakan suatu musuh bersama terhadap kelompok lain. Misalkan, Belanda memberikan pengakuan legitimasi kepada entitas tertentu di suatu wilayah dan tidak mengakui entitas lain. Dengan demikian, Belanda memancing terjadinya perang saudara.²¹ Pola tersebut tergambar pada pecahnya perang Padri di Minangkabau, antara kelompok Islam puritan dengan kelompok Islam adat.

Seperti diketahui, Belanda sangat berambisi menguasai wilayah Minangkabau, yang kaya rempah-rempah, emas dan Batubara.²² Terlebih, Minangkabau dianggap strategis karena memiliki pelabuhan yang terhubung langsung ke Samudera Pasifik, jalur perdagangan dunia.²³ Akan tetapi, Belanda menyadari untuk menguasai wilayah Minangkabau tidaklah mudah. Mereka harus berhadap-hadapan dengan kelompok masyarakat yang sangat solid dan militan. Belanda dengan segala pengetahuannya yang lebih maju kemudian berupaya menghancurkan kekuatan dan soliditas masyarakat Minang. Cara yang dipakai adalah menerapkan taktik politik divide et impera. Taktik pecah belah tersebut dilakukan dengan mempertajam warna perbedaan di tengah kehidupan masyarakat Minang. Belanda mengkapitalisasi polarisasi agama yang sejak semula memang sudah ada di tengah masyarakat. Walaupun, sesungguhnya polarisasi tersebut belum terlalu besar. Namun, kondisinya semakin parah ketika Belanda ikut campur.²⁴

Belanda berpandangan masyarakat Minangkabau yang solid dan militan tersebut

²⁰ H. Mulyanto, "Posisi Buton dalam Arus Sejarah Indonesia," *HUMANIS: Journal of Arts and Humanities*, 2022, 215-226.

²¹ D. K. Putra, "*Divide et Impera*" Mengenak Taktik dan Strategi Orang Belanda. Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014.

²² Domingus E. B. Saija, dkk., Migrasi Orang Minangkabau ke Kota Ambon . *Jurnal Ilmu Sosiologi*, 2021, 45-61.

²³ M. Zed, *Kota Padang Tempo Doeloe Zaman Kolonial*, Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2009.

²⁴ N. Wonsela, *Kontribusi Kaum Paderi dalam Modernisasi Pendidikan di Minangkabau Abad XVII – Awal Abad XX*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

sesungguhnya memiliki celah perbedaan. Perbedaan tersebut terutama terjadi pada kelompok Padri dan kelompok adat. Padri adalah kelompok Islam yang mengusung pemikiran pemurnian Islam komunikatif.²⁵ (gagasan Islam yang diusung Ibnu Taimiyah).²⁶ Di masa sekarang, kaum Padri identik dengan kelompok Islam puritan dan fundamentalis. Mereka berpegang teguh pada syariat agama dan berusaha mengubah kebiasaan masyarakat ke arah Islam secara radikal. Sementara, kaum adat adalah kelompok Islam yang ketaatannya terhadap agama masih tergolong rendah. Mereka masih menggunakan hukum adat untuk menetapkan warisan, cenderung melonggarkan kewajiban ritual formal agama Islam, mereka cenderung menjaga tradisi warisan nenek moyang. Kaum adat ini banyak mendapat dukungan masyarakat luas, termasuk dari kelompok masyarakat yang masih hobi dengan praktik judi sabung ayam, meminum arak, menggunakan tembakau dan sirih dan lain sebagainya.²⁷

Belanda kemudian menjalankan politik *divide et impera* untuk memperbesar polarisasi. Caranya dengan menjalin aliansi dengan kelompok masyarakat yang lebih banyak massa pendukungnya, yakni kelompok adat, lalu ikut memprovokasi mereka untuk memerangi kelompok Padri. Masuknya Belanda semakin memperburuk suasana. Pembelahan semakin terlihat jelas. Masing-masing kelompok mulai merasa terancam dan timbul keinginan untuk saling menegasikan. Puncaknya, Belanda kemudian membantu kaum adat untuk memerangi kaum padri dengan sejumlah kesepakatan, di antaranya meminta kaum adat menyerahkan wilayah Minangkabau untuk dikuasai penuh Belanda. Sejarah kemudian mencatat kelompok adat yang dibantu Belanda berhasil memenangi peperangan. Akan tetapi, sesungguhnya kemenangan adalah milik penjajah Belanda, bukan kaum adat. Karena segera setelah itu, Belanda menjadi penguasa penuh di Sumatera Barat dan menindas masyarakat minang secara keseluruhan. Kelompok adat dan padri yang sudah tercerai-berai tersebut, tidak memiliki kemampuan dan kekuatan lagi untuk bangkit melawan. Selama berkuasa, Belanda terus-menerus mempertahankan polarisasi tersebut.²⁸

Kondisi kontras dilakukan Belanda pada tahun 1900-an. Saat itu Belanda justru memanfaatkan kelompok puritan (*modernisme*) dan berteman dengan mereka untuk

²⁵ Venus Antar, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004), h. 7-8.

²⁶ Ihsan Sanusi, "Kolonialisme Dalam Pusaran Konflik Pembaharuan Islam: Menelusuri Keterlibatan dan Peran Belanda dalam Keberlangsungan Konflik yang Terjadi di Minangkabau," *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2018, 1-16.

²⁷ Haedar Nashir, "Purifikasi Islam dalam Gerakan Padri," *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. XXXI, No. 69, 2008.

²⁸ Muhamad Radjab, *Perang Padri di Sumatra Barat*, Jakarta: Balai Pustaka dan Kepustakaan Populer Gramedia, 2019, h. 47.

menyerang kelompok Islam tradisional yang terkonsentrasi di pondok-pondok pesantren. Belanda mengkapitalisasi polarisasi yang sudah ada di antara kelompok Islam tradisional dan kelompok Islam modernis. Belanda mendukung kelompok Islam modernis yang diusung Kiai Ahmad Dahlan, lalu menyokong perkembangan sekolah-sekolah modernis yang digagas Muhammadiyah tersebut. Pada titik yang sama, Belanda menekan dan memprovokasi kelompok Islam tradisional yang berada di pondok-pondok pesantren. Belanda melakukan berbagai macam propaganda dengan menstigma kelompok Islam tradisional sebagai entitas yang kolot, terbelakang dan tidak maju.²⁹ Geertz dalam penelitiannya menyebutkan konflik antara dua kelompok Islam tersebut pernah sampai menyebabkan warga NU menolak satu masjid dengan orang Muhammadiyah. Kemudian membaca kitab Muhammad Abduh (penyebarkan paham purifikasi) dipandang sebagai dosa besar. Sehingga warna perbedaan dua kelompok ini semakin tajam.³⁰ Dengan harapan konflik sosial pecah dan Belanda akan dapat terus-menerus menjajah Indonesia. Namun, pada paruh tahun 1940an, kelompok Islam tradisional dan modernis mulai mengkonsolidasikan diri dan pada akhirnya dapat bersatu mengusir Belanda dari Indonesia.

Belanda menggunakan instrumen propaganda untuk memperbesar polarisasi agama. Cara kerjanya adalah dengan menyebarkan desas-desus, berita bohong atau hoax ke tengah masyarakat. Propaganda dijalankan secara sistematis, massiv, baik secara lisan atau tulisan. Belanda dengan segala sumber dayanya memanfaatkan media massa untuk memprovokasi, menciptakan sensitifitas antara agama dan memperbesar polarisasi. Propaganda yang dijalankan Belanda misalkan, sempat membuat masyarakat benci terhadap pesantren. Bahkan, masyarakat ikut membenci para kiai. Serangan Belanda terhadap pesantren tidak saja dalam bentuk labelisasi atau menstigmatisasi, namun sampai membunuh sejumlah kyai atau pimpinan pesantren.³¹

Belanda selama menjajah Indonesia juga mengkonstruksi perbedaan dengan melakukan segregasi sosial dengan membagi populasi penduduk menjadi tiga kelompok, yakni Eropa, Timur jauh (China, Arab dan India), dan kaum pribumi. Untuk memperdalam jurang perbedaan, Belanda menerapkan hukum yang berbeda terhadap ketiga kelompok

²⁹ Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1985.

³⁰ Ahmad Asroni, "Islam Puritan Vis a Vis Tradisi Lokal: Meneropong Model Resolusi Konflik Majelis Tafsir Al-Qur'an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purworejo," *Annual International Conference on Islamic Studies* (2666-2680). Surabaya: UIN Surabaya, 2012.

³¹ Syaripuddin Daulay, "Pergumulan Islam Indonesia Dengan Kolonialisme Abad ke-18 dan 19," *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1, 2021, h. 65-78.

ini. Belanda juga bersikap diskriminatif terhadap kelompok pribumi. Cara lainnya adalah dengan memperbesar perbedaan antar etnis, kemudian menyabotase komunikasi antar etnis. Cara sabotase tersebut yakni mengangkat etnis tertentu sebagai pejabat pemerintah Hindia Belanda dan anggota militer.³² Selain itu, Belanda juga membuat jurang pemisah dengan memberikan kesempatan terbatas kepada kelompok pribumi tertentu untuk mengenyam pendidikan sehingga tidak terjadinya kesetaraan. Taktik ini cukup berhasil membuat kelompok sosial masyarakat terbelah karena membuat mereka merasa terpisah satu sama lain.³³

Sebagai contoh di kalangan umat Islam, Belanda terus-menerus memperdalam warna perbedaannya. Dimulai pasca perang Diponegoro, dimana Belanda telah menghabiskan banyak sumber daya dan merasa heran dengan militansi serta perlawanan yang datang dari kelompok Islam di Jawa. Orang-orang Islam Jawa yang dulunya dianggap santun, cinta damai seketika berubah menjadi kelompok pemaarah dan mudah membunuh.³⁴ Belanda kemudian banyak menurunkan para ilmuwan terbaik yang berada di seluruh negeri Belanda untuk meriset watak khas orang Indonesia. Hasil riset tersebut digunakan Belanda dalam mengimplementasikan kebijakannya di Indonesia. Salah satu ilmuwan yang paling terkenal adalah Snouck Hurgronje. Dia ditugasi secara khusus oleh Belanda untuk melakukan serangkaian penelitian terhadap kelompok Islam di Indonesia.³⁵ Dari berbagai riset tersebut, Belanda memperoleh data penting tentang tipologi kelompok Islam, yakni kelompok putihan, yang distigma sebagai orang-orang taat beragama, lalu kelompok abangan, yakni kelompok Islam yang tidak terlalu taat beragama, terakhir adalah kelompok priyayi, yaitu kelompok Islam yang cenderung pro terhadap Belanda karena dipekerjakan sebagai aparatur pemerintah Hindia Belanda.³⁶

Warna tersebut dikonstruksi oleh Belanda dan perbedaannya semakin dipertajam. Dengan menggunakan taktik *divide et impera*, Belanda membangun aliansi dengan kelompok priyayi dan abangan, sekaligus memprovokasi untuk memerangi kelompok Islam putihan. Pada fase lainnya, Belanda berpihak pada kelompok putihan dan memprovokasi serta memerangi kelompok abangan. Sehingga warna putihan dan abangan

³² M. Ainurrahman, *Analisis Kebijakan Sosial Politik Pemerintah Hindia Belanda Untuk Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 1900-1942*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.

³³ H. Riska, "Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Portugis dan Belanda," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2021, 824 - 829.

³⁴ B. Vlekke, *Nusantara Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.

³⁵ D. Hendriani, "Snouck Hurgronje (1857-1936): Biografi dan Pemikirannya Tentang Islam di Indonesia," *Jurnal Widya Citra Pendidikan Sejarah*, vol. 1, no. 1, 2020.

³⁶ Zubair, "Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa," *DIALEKTIKA*, Vol. 9, No. 2, 2015, h. 34-46.

semakin tampak jelas perbedaannya. Pada periode tertentu, taktik ini cukup efektif dan berhasil meruntuhkan soliditas umat Islam dan melanggengkan kekuasaan Belanda di Indonesia.³⁷

Sejak awal, Belanda memang cenderung berusaha mengontrol kelompok Islam, selain karena menjadi agama mayoritas, kelompok Islam memang dianggap musuh abadi bangsa Belanda. Bangsa Belanda mengklaim Kristen lebih superior daripada Islam. Sehingga, pembelahan di kalangan umat Islam sengaja dikonstruksi dan dijadikan alat oleh Belanda untuk mencapai tujuan penjajahannya, baik menjajah secara ekonomi, agama maupun dominasi lainnya.³⁸

Konsep ini sejalan dengan pandangan Georg Simmel, yang mendefinisikan *divide et impera* sebagai upaya sengaja kelompok tertentu untuk menciptakan konflik sosial dengan tujuan memperoleh dominasi. Menurut George, kelompok dominan bisa mendapatkan keuntungan dari pihak yang berseteru dengan status sebagai kelompok penyeimbang. Selain itu, ketika kedua kelompok berseteru saling melemahkan, maka tidak memungkinkan lagi mereka memiliki kekuatan untuk melawan superioritas pihak penjajah.³⁹ Menganalisis strategi *divide et impera* dan relevansinya dengan polarisasi agama yang tercipta di masa sekarang sangat menarik dikaji mengingat kondisi tersebut jika terus-menerus dibiarkan akan memudahkan negara lain yang lebih superior untuk kembali menguasai bangsa Indonesia.

Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Politik *Divide et Impera* Belanda di Indonesia

Catatan sejarah menunjukkan Belanda pernah berhasil sekaligus gagal menjalankan strategi politik *divide et impera* di Indonesia. Perang Padri, seperti yang telah disinggung di atas merupakan salah satu contoh keberhasilan taktik tersebut. Kemudian penaklukan kesultanan Gowa di Makassar, Perang Diponegoro, Perang Aceh, Perang Banjar dan lain sebagainya, merupakan contoh-contoh keberhasilan strategi politik *divide et impera* yang diterapkan Belanda.⁴⁰ Namun, di penghujung tahun 1940-an, upaya Belanda memecah

³⁷ A. Bahrin, *Snouck Hurgronje dan Islam Hindia Belanda*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2012.

³⁸ M. Jannah, *Politik Hindia Belanda Terhadap Umat Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

³⁹ A. T. Keil, "Divide et Impera: Conflictual Ties in Broker Relationships," *Academy of Management*, 2017, 50-62.

⁴⁰ Putu Devi Saraswati, *Pengaruh Model Quantum Teaching Terhadap Efikasi Diri dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS di SMP Jembatan Budaya, Kuta*. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2022.

belah bangsa Indonesia, salah satunya memprovokasi kelompok Islam NU dan Muhammadiyah terbukti gagal. Menjelang tahun 40an, warga NU dan Muhammadiyah mulai terkonsolidasi dan bersatu. Bahkan, kedua organisasi massa Islam terbesar ini sempat membentuk organisasi bersama yang dinamakan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Salah satu tujuan dibentuknya MIAI adalah upaya bersama kelompok Islam untuk menentang penjajah Belanda.⁴¹ Kegagalan politik *divide et impera* juga terlihat pada saat Van Mook memimpin peperangan dalam agresi militer I, yang bertujuan hendak kembali menjajah Indonesia pada rentang tahun 1945-1947.⁴²

Temuan riset ini menunjukkan ada beberapa faktor yang menyebabkan politik *divide et impera* tersebut berhasil. *Pertama*, adanya ketergantungan ekonomi kelompok elit Indonesia terhadap Belanda. Pada era kolonialisasi, baik pada masa VOC maupun Belanda, kelompok elit di Indonesia memperoleh banyak surplus kekayaan dan kenyamanan dari Belanda. Mereka disugahi kekayaan yang berlimpah, diberi jabatan di pemerintahan dan memperoleh kesetaraan dengan bangsa Belanda. Relasi yang terbentuk antara kelompok elit dan penjajah Belanda ini adalah relasi *patronase*. Maswadi Rauf menjelaskan *patronase* sebagai hubungan timbal balik diantara dua individu, dimana satu individu memiliki status lebih tinggi, baik dari sisi sosial ataupun ekonomi. Dari status tersebut, dia berupaya memberikan perlindungan kepada individu lain yang statusnya lebih rendah. Sebagai *rewardnya*, individu yang diberikan perlindungan tersebut, harus membalas dengan memberikan dukungan, bahkan termasuk pelayanan yang bersifat pribadi sekalipun kepada sang *patron*. *Patron* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku klien. Sedangkan klien berada dalam posisi *tersubordinasi*, sehingga dia akan menerima pengaruh dari *patron* tersebut secara sukarela. Dalam hal ini relasi yang terbangun adalah relasi yang tidak seimbang antara *patron* dan klien. Dalam konteks penjajahan, relasi *patronase* yang terbentuk antara elit dan Belanda adalah relasi politik *balas jasa dan hutang budi*. Belanda sebagai *patron* telah memberikan insentif baik berupa materi maupun kekuasaan, sedangkan para elit sebagai klien harus mengikuti kehendak dan keinginan Belanda sebagai *balas jasa* atas kebaikan tersebut. Pola hubungan ini sangat bersifat personal, yang pada akhirnya akan menciptakan dukungan, loyalitas, fanatisme, yang dalam beberapa hal menjadi sangat berlebihan. Bahkan, menurut Maswadi Rauf, dalam hal tertentu klien rela

⁴¹ Wahyuddin, "Partisipasi Umat Islam Dalam Pembangunan Politik (Perjuangan Kemerdekaan dan Mengisi Kemerdekaan)," *Jurnal Rihlah*, vol. 4, no. 1, 2016.

⁴² Sumiyati, "Kondisi Politik di Kesultanan Bima (1915-1950)." *DIAKRONIKA*, vol. 20, no. 1, 2020.

mempertaruhkan nyawanya untuk patron.⁴³

Ketergantungan elite Indonesia terhadap Belanda menyebabkan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sehingga, politik adu domba bisa berhasil dengan amat mudah dijalankan, karena nyaris tidak ada penolakan dari kelompok elit, bahkan mereka cenderung mendukung kebijakan Belanda. Dalam hal ini, Belanda dapat terus melakukan dominasi dan penindasan dikarenakan kelompok elit tersebut tidak hanya tunduk dan patuh kepada Belanda, melainkan takut kehilangan materi, kekayaan dan kenyamanan. Kondisi ini menyebabkan kelompok elit yang memiliki ketergantungan terhadap Belanda, bisa dengan mudah digerakkan untuk melawan kelompok lain yang menentang Belanda. Di sinilah taktik *divide et impera* bisa berfungsi. Sebagai contoh pada perang padri, kelompok adat merasa berhutang budi dengan Belanda, karena mereka telah banyak membantu dan mensupport kaum adat dalam memerangi kaum padri. Belanda mengimingi kewenangan dan kekuasaan kepada kaum adat. Untuk memerangi kaum padri, Belanda bahkan ikut menurunkan para serdadu terlatih dan persenjataan yang lengkap.⁴⁴ Relasi tersebut menyebabkan kaum adat merasa tergantung dengan Belanda dan mudah saja digerakkan dan diprovokasi. *Kedua*, adanya faktor stabilitas politik dan ekonomi di negeri Belanda. Selama menjajah Indonesia, Belanda jarang sekali mendapat gangguan dari dalam negeri. Stabilitas politik mereka terjaga, elite di negeri Belanda solid, dan ekonomi mereka juga stabil. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda, termasuk taktik *divide et impera*, dapat berlangsung mulus tanpa gangguan yang berarti.

Sedangkan faktor kegagalan taktik *divide et impera*, antara lain dikarenakan tidak ada lagi ketergantungan kelompok elite Indonesia terhadap Belanda. Pada dekade tahun 40-an, Belanda mengalami krisis ekonomi. Kondisi ini berimbas pada wilayah jajahan di Indonesia. Harga komoditi hancur yang menyebabkan banyak perusahaan tutup. Belanda tidak memiliki keuangan yang cukup untuk menggaji pegawai, sehingga banyak aparatur Pemerintah Hindia Belanda yang dipecat. Termasuk kaum pribumi yang bekerja sebagai anggota polisi dan militer terpaksa dirumahkan karena masalah keuangan.⁴⁵ Akibatnya, relasi patron klien terganggu. Tidak ada lagi ketergantungan kelompok elite di Indonesia terhadap Belanda. Pada titik ini, kelompok-kelompok elite yang awalnya berelasi dengan

⁴³ M. Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI, 2021.

⁴⁴ Dedi Arsa, "Yang Tersingkap dan Yang Tersungkup: Perang Padri dan Implikasinya Terhadap Pakaian Keseharian Perempuan Minang-Muslim Pada Awal Abad XIX," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, no. 2, 2018.

⁴⁵ Padmo, "The Depression of the 1930s and Its Impact on the Dutch East Indies," *Journal of the Humanities*, 1991, h. 153.

Belanda kemudian bergabung bersama masyarakat untuk melakukan perlawanan. Belanda sudah tidak mampu lagi memberikan sumber daya dan kenyamanan kepada kelompok elite. Hal ini menyebabkan bangsa Indonesia menyolidkan diri dan mempercepat proses kemerdekaan. Van Mook sempat berupaya kembali melancarkan taktik *divide et impera* dengan mengiming-imingi kelompok elite, termasuk Soekarno dan Hatta dengan berbagai kewenangan dan kekuasaan, tapi ditolak.⁴⁶ Warga NU dan Muhammadiyah di penghujung tahun 40an tersebut sudah tidak mudah diprovokasi oleh Belanda, sehingga polarisasi cenderung mengecil. Elite politik di negeri Belanda juga sedang bertikai antara kelompok agama, sosialis dan komunis, sehingga pada fase tersebut taktik *divide et impera* gagal berfungsi di Indonesia.

Tabel 1.

Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Taktik *Divide et Impera*

| No | Faktor Keberhasilan | Faktor Kegagalan |
|----|---|--|
| 1 | Adanya Ketergantungan ekonomi kelompok elite Indonesia kepada Belanda | Kelompok elite di Indonesia kehilangan fasilitas dan tidak memperoleh keuntungan lagi dari Belanda |
| 2 | Belanda dan elite Indonesia terbentuk relasi patron-klien | Putusnya relasi patron-klien antara Belanda dan elite di Indonesia |
| 3 | Adanya stabilitas politik dan ekonomi di negeri Belanda | Terjadinya krisis ekonomi yang dahsyat di negeri Belanda sehingga memicu konflik elite |

Relevansi Politik *Divide et Impera* dan Polarisasi Agama di Indonesia

Politik *divide et impera* yang diciptakan Belanda untuk membelah masyarakat Indonesia memiliki bentuk dan model yang sama dengan polarisasi agama yang terjadi di masa sekarang. Hanya saja, dulu, aktor yang mendesainnya jelas, yaitu Belanda. Kepentingannya adalah untuk menghancurkan kekuatan dan soliditas bangsa Indonesia, dengan tujuan untuk penjajahan. Sedikit berbeda dengan polarisasi agama yang terjadi sejak Pilkada DKI tahun 2017 dan dilanjutkan dengan Pilpres tahun 2019 lalu. Masyarakat

⁴⁶ Ariffudin dan Zulkarnain, "Kiprah Politik Sutan Sjahrir Dalam Pemerintahan (1945-1947)," *Risalah*, vol. 1, no. 3, 2016, h. 132.

Indonesia telah terpolarisasi ke dalam dua kutub besar, yang distigma sebagai kelompok “Cebong” dan “Kampret”. Cebong diasosiasikan sebagai pendukung Joko Widodo dan kampret adalah kelompok pendukung Prabowo Subianto. Setelah Jokowi menjadi Presiden, narasi tersebut tidak hilang bahkan cenderung semakin mengental. Kelompok cebong kemudian diasosiasikan sebagai pendukung pemerintah, sebaliknya kelompok kampret adalah oposisi. Pembelahan ini tidak segera berakhir sekalipun Prabowo Subianto telah masuk kabinet Jokowi.⁴⁷ Di sini, aktor yang mendesain pembelahan tidak tampak jelas. Siapa yang sengaja memainkannya tidak kelihatan. Apakah berlangsung secara alamiah ataukah sengaja didesain oleh kepentingan asing? Hal ini tidak tampak secara nyata. Akan tetapi, pola pembelahannya sangat presisi, yang dimainkan adalah sentimen agama.

Kelompok fundamentalisme Islam (kelompok yang mengusung gagasan pemurnian Islam Ibnu Taimiyah), ikut memperbesar terjadinya polarisasi. Mereka berdiri di kutub penentang Jokowi atau pemerintah. Kelompok ini semakin membesar dan cenderung memperoleh dukungan, utamanya dari kelompok muslim urban, yang menurut riset berjumlah sekitar 40 persen dari populasi muslim di Indonesia.⁴⁸ Kristalisasi kelompok ini dibentuk oleh aktivitas politik, dimulai dari Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Pasca Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pemerintah, citra Jokowi di mata kelompok fundamentalisme ini semakin buruk, kebenciannya semakin mendalam.⁴⁹

Kelompok ini melabeli pemerintahan Jokowi sebagai antek asing. Kondisi ini semakin diperkeruh oleh kebijakan Jokowi yang membuka investasi besar-besaran dari negeri China. Disebarlah propaganda ancaman jika etnis China di Indonesia akan menyebarkan paham komunisme anti agama.⁵⁰ Polarisasi ini semakin dipertajam oleh aktivitas politik, dimana sentiment agama seperti sengaja dikonstruksi. Kondisi ini sangat berbahaya, mengingat pembelahan yang semakin dalam akan menciptakan pertentangan dan pertikaian. Sebagaimana politik *divide et impera* yang dijalankan Belanda, ujung dari polarisasi adalah terjadinya perang saudara. Masing-masing kelompok akan saling menegasikan. Saling membunuh. Kekuatan bangsa akan hancur karena terjadinya

⁴⁷ Adam, “Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia,” *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 2022, h. 90.

⁴⁸ Syeirazi, *Wasathiyah Islam*. Jakarta: Alif.id, 2020.

⁴⁹ Felixius, *Framing Media Dalam Kampanye Politik Jokowi-Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019 di Media Seward.com*. Jakarta: UPN Veteran, 2022.

⁵⁰ Dewi Rahmayuni dan Helmi Hidayat, “Hierarki Pengaruh Isu-Isu Moderasi Beragama pada Media Guo Ji Ri Bao Studi Kasus Berita Konflik Etnis Uighur di Xinjiang,” *Jurnal Studi Jurnalistik*, vol. 2, no. 1, 2020.

pelemahan akibat perang saudara. Soliditas anak bangsa akan tercabik-cabik sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas. Ketika negara tidak stabil, maka, peluang asing kembali menjajah Indonesia terbuka lebar. Ini lah relevansi dari politik *divide et impera* yang dijalankan Belanda dengan polarisasi agama yang terjadi di Indonesia.

Indonesia yang kaya sumber daya dan luas wilayahnya, tidak mudah untuk dikendalikan. Jalan terbaik yang bisa dijalankan adalah melakukan siasat adu domba. Konflik antar suku, antar agama sengaja diciptakan. Bagi Belanda, penduduk yang sudah lemah karena konflik akan lebih mudah untuk diperangi. Tidak mungkin menjajah suatu bangsa yang dalam kondisi solid dan kuat. Membelah populasi adalah bagian dari strategi untuk melemahkan. Belanda berpandangan, dengan politik pecah belah, mereka tidak perlu membuang banyak energi dan sumber daya untuk menguasai suatu wilayah. Penduduk yang sudah lelah karena konflik cukup diajak kerjasama dan kekayaan buminya tinggal dikeruk.⁵¹

Polarisasi agama yang terjadi pasca Pilpres 2019 di Indonesia, telah membentuk diskriminasi dan membuat identitas kelompok saling berbenturan.⁵² Kondisi tersebut mirip sebagaimana masa penjajahan Belanda, di saat politik *divide et impera* diterapkan. Belanda menciptakan pembelahan baru, selain itu juga mengeksploitasi perbedaan dalam identitas kelompok. Polarisasi agama yang terjadi pasca Pilpres di Indonesia juga seperti itu, dimana kelompok fundamentalisme tersebut telah membedakan dirinya dengan yang lain.⁵³ Kendati tidak kelihatan siapa yang mendesainnya, politik dalam arena Pilpres 2019 telah berperan penting menciptakan polarisasi agama. Pilpres telah menjadi instrumen yang mengeksploitasi perbedaan identitas kelompok, lalu satu sama lain terlibat saling memburukkan. Polarisasi agama telah menciptakan pertentangan antar kelompok yang kian hari semakin tajam.

Kondisi Indonesia di masa penjajahan, boleh jadi dapat terjadi lagi di masa sekarang. Hal ini dikarenakan polarisasi agama yang semakin tajam dapat menghancurkan persatuan bangsa. Penjajahan hanya akan terjadi jika suatu bangsa dalam kondisi tercerai-berai. Penjajahan tidak akan mungkin terjadi pada bangsa yang kuat dan solid.

Divide et impera pernah tidak relevan menjelang kemerdekaan RI tahun 1940an.

⁵¹ Syaripuddin Daulay, "Pergumulan Islam Indonesia Dengan Kolonialisme Abad ke-18 dan 19," *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1, 2021.

⁵² I. T. Sihidi, dkk. "Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 5, no. 2, h. 176.

⁵³ J. Indrawan, "Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya," *Journal of Political Issues*, 2019.

Hal ini dikarenakan kelompok masyarakat yang telah terbelah mampu mengkonsolidasikan diri. Titik balik ini terjadi karena masing-masing kelompok yang terpolarisasi membentuk semacam kesadaran bahwa Belanda merupakan musuh bersama. Sehingga, masing-masing kelompok tidak lagi disibukkan dengan warna perbedaan. Mereka berupaya mencari kesamaan untuk mengusir penjajah Belanda.

Politik *divide et Impera* juga cenderung tidak relevan berfungsi di negara yang menganut sistem demokrasi, yang saat ini dianut Indonesia. Hal ini dikarenakan semua kelompok memiliki posisi yang sama untuk bersaing. Dominasi tidak terkonsentrasi hanya pada satu kelompok saja. Demokrasi juga telah memungkinkan terjadinya reorganisasi sosial yang meluas. Ditambah pula distribusi pengetahuan yang telah merata, lalu adanya teknologi informasi sehingga memudahkan masing-masing kelompok berkomunikasi dan mengkonsolidasikan diri tanpa batas, sehingga kelompok sosial tersebut tidak mudah dikapitalisasi dan tidak mudah untuk dibentur-benturkan. Hal ini dikarenakan di antara mereka telah terbangun kesadaran politik yang merata. Namun demikian, polarisasi agama yang dapat memicu ketegangan tetap perlu dibendung untuk menciptakan stabilitas negara. Teknologi informasi yang kini membanjiri Indonesia, dapat menjadi dua sisi mata pisau, sebab penggunaan teknologi informasi yang tidak bertanggung jawab justru dapat mengkristalisasi perbedaan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Taktik *divide et impera* memiliki kekuatan untuk memecah-belah kelompok sosial. Akan tetapi, kekuatannya tidak mutlak, sebab kelompok sosial yang berhasil dibelah dalam kondisi tertentu bisa saja menjadi ancaman. *Divide et impera* digunakan Belanda untuk menaklukkan Indonesia dengan cara mengkooptasi potensi kekuatan penduduk Indonesia. Kooptasi dijalankan dengan memanfaatkan lemahnya pengetahuan penduduk Indonesia. Taktik pecah belah ini dijalankan Belanda melalui kekuatan yang terorganisir, mereka melakukan dominasi terhadap pengetahuan dan sumber daya ekonomi. Dominasi dilakukan Belanda melalui serangkaian aksi represi untuk menjaga agar pembelahan kelompok tetap terjaga. Relevansi politik *divide et impera* dengan polarisasi agama yang terjadi di masa sekarang adalah adanya jurang perbedaan yang semakin dalam di antara kelompok agama. Pada titik ini, polarisasi dapat memecah-belah persatuan sehingga memicu lahirnya instabilitas yang membahayakan negara. Dengan kata lain, polarisasi agama relevan dengan praktik *divide et impera* yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk melemahkan suatu bangsa. Politik *divide et Impera* juga cenderung tidak relevan

berfungsi di negara yang menganut sistem demokrasi, yang saat ini dianut Indonesia. Hal ini dikarenakan semua kelompok memiliki posisi yang sama untuk bersaing. Dominasi tidak terkonsentrasi hanya pada satu kelompok saja. Demokrasi juga telah memungkinkan terjadinya reorganisasi sosial yang meluas. Ditambah pula distribusi pengetahuan yang telah merata, lalu adanya teknologi informasi sehingga memudahkan masing-masing kelompok berkomunikasi dan mengkonsolidasikan diri tanpa batas, sehingga kelompok sosial tersebut tidak mudah dikapitalisasi dan tidak mudah untuk dibentur-benturkan. Hal ini dikarenakan di antara mereka telah terbangun kesadaran politik yang merata. Namun demikian, polarisasi agama yang dapat memicu ketegangan tetap perlu dibendung untuk menciptakan stabilitas negara. Teknologi informasi yang kini membanjiri Indonesia, dapat menjadi dua sisi mata pisau, sebab penggunaan teknologi informasi yang tidak bertanggung jawab justru dapat mengkristalisasi perbedaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam. "Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia". *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, (2022): 88-103.
- Ahmad, F. A. "Hibriditas Tokoh Belanda Dalam Kumpulan Semua Untuk Hindia Karya Iksaka Banu: Suatu Kajian Poskolonial". Padang: Universitas Andalas, 2016.
- Ainurrahman, M. "Analisis Kebijakan Sosial Politik Pemerintah Hindia Belanda Untuk Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 1900-1942". Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
- Ardini Mulyadi, I. B. "Narasi Sejarah Novel Tambora Karya Agus Sumbogo: Kajian Sosiologi Sastra". *Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud*, (2018): 75-80.
- Ariffudin dan Zulkarnain. "Kiprah Politik Sutan Sjahrir Dalam Pemerintahan (1945-1947)". *Risalah*, 1, no. 3, (2016): 129-140.
- Arsa, D. "Yang Tersingkap Dan Yang Tersungkup: Perang Padri Dan Implikasinya Terhadap Pakaian Keseharian Perempuan Minang-Muslim Pada Awal Abad XIX." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 18, no. 2, (2018): 27-66.
- Asroni, Ahmad. "Islam Puritan Vis a Vis Tradisi Lokal: Meneropong Model Resolusi Konflik Majelis Tafsir Al-Qur'an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purworejo". *Annual International Conference on Islamic Studies (2666-2680)*, (2012).
- Bahrin, A. "Snouck Hurgronje dan islam hindia belanda". Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Daulay, Syaripuddin. "Pergumulan Islam Indonesia Dengan Kolonialisme Abad ke-18 dan 19," *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2, no. 1, (2021): 65-78.
- Felixius. "Framing Media Dalam Kampanye Politik Jokowi-Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019 di Media Seword.com". Jakarta: UPN Veteran, 2022.
- Ginting, A. M. "Pengaruh Belanda Terhadap Struktur Pemerintahan dan Kehidupan Politik Kerajaan Purba 1906 – 1945". *Jurnal Pendidikan Sejarah*, (2017): 1-14.
- Habib, A. "Konflik Antar Etnik di Pedesaan". Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Hendriani, D. "Snouck Hurgronje (1857-1936): Biografi dan Pemikirannya Tentang Islam di Indonesia," *Jurnal Widya Citra Pendidikan Sejarah*, 1, no. 1, (2020): 54-70.
- Hermawan, S. "Tionghoa dalam Novel Ca-Bau-Kan". Yogyakarta: Basabasi, 2018.

- Indrawan, J. "Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya." *Journal of Political Issues*, (2019): 50-61.
- Iranti Mantasari, Y. M. "Strategi *Devide et Impera* oleh Amerika Serikat dalam Konflik di Suriah." *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, (2020): 18-38.
- Jannah, M. "*Politik Hindia Belanda Terhadap Umat Islam di Indonesia*". Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Keil, A. T. "Divide et Impera: Conflictual Ties in Broker Relationships". *Academy of Management*, (2017): 50-62.
- Khairunnisa. "*Motivasi dan Perilaku Hijrah pada Remaja Ditinjau dari Teori Tindakan Sosial Max Weber*". Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.
- Lestari, Y. S. "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama". *Journal of Politics and Policy*, (2018): 19-30.
- Muhammad Agung Sujadi, M. B. "Kebijakan Uang Darurat Lampung pada Agresi Militer Belanda II di Lampung Tahun 1949". *Garuda*, (2018): 1-12.
- Mulyanto, H. "Posisi Buton dalam Arus Sejarah Indonesia" *HUMANIS Journal of Arts and Humanities*, (2022): 215-226.
- Nashir, Haedar. "Purifikasi Islam dalam Gerakan Padri," *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, XXXI, No. 69, (2008).
- Nurwiyati, R. T. "Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Dalam Memperjuangkan Kepentingan Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (2017): 1-10.
- Olii, N. "*Politik Kolonial Belanda Dalam Menanamkan Kekuasaan di Minahasa Abad ke - 17*". Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
- Padmo. "The Depression of the 1930s and Its Impact on the Dutch East Indies". *Journal of the Humanities*, (1991): 153.
- Purnawati, D. M. "Polarisasi Geo Politik Kerajaan di Bali Abad XVI-XX". *Media Komunikasi FIS*, (2020): 168-181.
- Putra, A. "*Kuta Pada Abad XIX*" dalam *Bahasa, Sastra, dan Budaya*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Putra, D. K. "*Devide et Impera*" *Mengenak Taktik dan Strategi Orang Belanda*. Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014.
- Radjab, Muhamad. "*Perang Padri di Sumatra Barat*". Jakarta: Balai Pustaka dan Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Rahmayuni, Dewi. Helmi Hidayat. "Hierarki Pengaruh Isu-Isu Moderasi Beragama pada Media Guo Ji Ri Bao Studi Kasus Berita Konflik Etnis Uighur di Xinjiang". *Jurnal Studi Jurnalistik*, 2, no. 1, (2020): 1-24.
- Rauf, M. "*Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*". Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI, 2001.
- Riska, H. "Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Portugis dan Belanda". *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (2021): 824 - 829.
- Rochayati, S. "*Jatuhnya benteng Ujung Pandang, Makassar pada Belanda (VOC)*". Surakarta : UNS-FKIP Prog. Studi Pendidikan Sejarah, 2010.
- Rokhman, S. "Panduan Islam Dalam Berkomunikasi Lintas Suku dan Budaya". *Jurnal Dakwah*, (2021): 123-133.
- Saija, Dominggus E. B. dkk. "Migrasi Orang Minangkabau ke Kota Ambon". *Jurnal Ilmu Sosiologi*, (2021): 45-61.
- Santoso, A. "*Dampak Kerusakan Mei 1998 terhadap Perekonomian Masyarakat Etnis Tionghoa di Surakarta*". Surakarta: STKIP PGRI Pacitan, 2021.
- Sanusi, Ihsan. *Kolonialisme Dalam Pusaran Konflik Pembaharuan Islam: Menelusuri*

- Keterlibatan dan Peran Belanda dalam Keberlangsungan Konflik yang Terjadi di Minangkabau. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora*, (2018): 1-16.
- Saraswati, Putu Devi. *Pengaruh Model Quantum Teaching Terhadap Efikasi Diri dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS di SMP Jembatan Budaya, Kuta*. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2022.
- Sihidi, I. T., Roziqin, A., & Suhermanto, D. F. Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5, no. 2, (2020): 174-189. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8516>
- Suminto, Husnul Aqib. *"Politik Islam Hindia Belanda"*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Sumiyati. "Kondisi Politik di Kesultanan Bima (1915-1950)." *DIAKRONIKA*, 20, no. 1, (2020): 20-41.
- Supriyono, A. "Tinjauan historis Benteng VOC di Jepara". *Historical Studies Jurnal*, (2015): 26-39.
- Syarwi, P. "Polarisasi Isu, Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019". *Jurnal Communitarian*, (2022): 591-602.
- Syeirazi. *"Wasathiyah Islam"*. Jakarta: alif.id, 2020.
- Vlekke, B. *"Nusantara Sejarah Indonesia"*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.
- Wahyuddin. "Partisipasi Umat Islam Dalam Pembangunan Politik (Perjuangan Kemerdekaan dan Mengisi Kemerdekaan)." *Jurnal Rihlah*, 4, no. 1, (2016): 109-115.
- Wiharyanto, A. K. *"Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX"*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2008.
- Wonsela, N. *"Kontribusi Kaum Paderi dalam Modernisasi Pendidikan di Minangkabau Abad XVII – Awal Abad XX"*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Zed, M. *Kota Padang Tempo Doeloe Zaman Kolonial*. Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2009.
- Zubair. Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa. *DIALEKTIKA*, 9, No. 2, (2015): 34-46.